



Kemiskinan Ekstrem Perlu Penanganan Khusus

YOGYA (KR) - Angka kemiskinan di DIY termasuk ekstrem. Dari 474 ribu lebih total jiwa di DIY, 11,9 persennya masuk kategori miskin. Dan yang masuk kategori miskin ekstrem ada 4 persen atau sekitar 160 ribu jiwa.

"Bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem, harus segera dituntaskan. Salah satunya dengan skema bantuan, karena sudah sulit untuk bekerja atau hidup mandiri," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta, Selasa (21/6).

Garis kemiskinan DIY tahun 2021 sekitar Rp 483.000 per kapita per bulan. Warga miskin yang ekstrem konsumsi kebutuhan pokok per bulannya jelas jauh di bawah itu. Mereka mungkin sama sekali tidak memiliki penghasilan karena kondisi fisik maupun usia. Huda mencontohkan warga yang masuk kategori miskin ek-

strem. Seperti lansia yang sakit, warga difabel berat dan sebagainya.

Untuk itu kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintah DIY dan berkolaborasi dengan semua jenjang pemerintahan. Warga miskin yang sulit memenuhi kehidupannya karena berbagai kondisi seperti sudah berusia lanjut, difabel berat, sakit terus menerus dan sebagainya mestinya dicukupi kebutuhan dasarnya oleh negara. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Mengenai skema bantuan yang ada

saat ini sudah cukup baik dan membantu. Tapi dari sisi jumlahnya belum mampu mengentaskan dari garis kemiskinan. Misalnya BNPT sembako sejumlah 382 ribu orang dengan besaran Rp 200.000. Angka tersebut belum bisa mengentaskan warga miskin ekstrem, karena mereka memerlukan Rp 483.000 per bulan. Jika digabung dengan bantuan lain juga belum mencapai angka tersebut.

Pihaknya mendorong agar kemiskinan ekstrem ini diberikan perlakuan khusus. Diantaranya dengan memberikan bantuan yang mencukupi kebutuhan hingga keluar dari garis kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam format yang tepat misal sembako atau makanan, protein dan sebagainya hingga memenuhi kebutuhan minimal mereka.

Alokasi anggaran kemiskinan 2021 dari Pemda DIY sebesar Rp 273,7 M dan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,89 persen hingga angka kemiskinan DIY sebesar 11,91 persen. Perhitungan secara kasar yang disimulasikan tim DPRD DIY, diperlukan anggaran tambahan sekitar 400 miliar setahun untuk menangani kemiskinan ekstrem ini. Anggaran tersebut digunakan khusus untuk menambahkan bantuan kebutuhan pokok pada warga miskin ekstrem yang tidak mungkin lagi bekerja dan berpenghasilan.

"Angka tersebut mestinya bisa dikordinasikan dengan kabupaten/kota, sehingga bisa berbagi beban untuk menyelesaikan kewajiban negara ini. Harapannya jika warga miskin ekstrem dibantu kebutuhan pokoknya hingga keluar dari

garis kemiskinan, bisa menurunkan angka kemiskinan sekitar 4 persen lagi," ungkapnya.

Memang ini semua perlu dihitung lebih detail. Tapi DPRD DIY yakin jika angka tersebut dipenuhi dan dilaksanakan secara tepat, kemiskinan di DIY akan turun drastis. Perlu kesungguhan dan koordinasi kuat dengan kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Tambahan angka Rp 400 miliar misalnya dibagi dengan kabupaten kota masing-masing setengahnya. Maka Pemda DIY hanya perlu menambahkan sekitar Rp 200 miliar.

"Kemiskinan ekstrem ini dalam pandangan kami perlu menjadi prioritas utama pemda DIY. Karena merupakan kewajiban konstitusi dan demi peningkatan kesejahteraan warga," jelasnya. (Awh/Bro)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005